

TPK Gabion berangsur normal

JAKARTA: Kegiatan Terminal Peti Kemas (TPK) Gabion di Pelabuhan Belawan kembali normal, setelah satu container crane (CC) dan satu unit harbour mobile crane (HMC) yang sebelum rusak sudah beroperasi dan normal kembali.

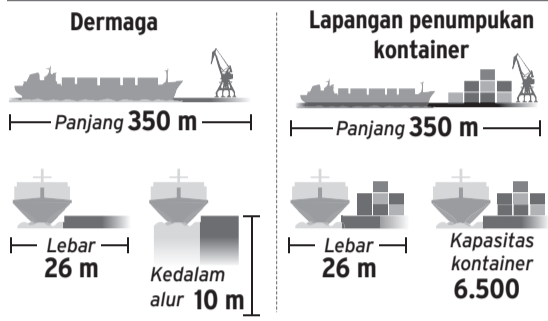
TPK Gabion merupakan terminal peti kemas domestik yang dikelola BICT. Kerusakan satu unit CC dan satu unit HMC itu terjadi pada 25 Oktober 2010.

"Kini ada satu kapal PT Tanto Intim Lines dan satu kapal PT SPIL antre tunggu sandar, sedangkan kapal PT Meratus Lines, dan PT Temperan Emas Tbk. tidak ada lagi yang antre," ujar Syamsul Bahari Kausil, General Manager Belawan International Container Terminal (BICT) kepada *Bisnis* kemarin.

Dia mengatakan hal tersebut menanggapi laporan dari perusahaan pelayaran di Tanjung Priok yang menyebutkan meski kondisi TPK Gabion sudah normal, dampak dari kerusakan satu unit CC dan satu unit HMC itu masih tetap bereset terhadap jadwal kunjungan kapal berikutnya.

Akibatnya kini KM Armada Permata (tiba 11/11), KM Tanto Karunia II (tiba 10/11) dan KM Tanto Cahaya (tiba 12/11) tetap saja harus antre dan hingga kini masih belum bisa sandar.

Data teknis dermaga domestik Belawan International Container Terminal



Sumber: Data PT Pelabuhan Indonesia I, diolah *BISNIS/K471/AGUS TAUFIK*

TRANSIT

Ratusan truk tertahan di Merak

MERAK: Ratusan truk, yang mengangkut kebutuhan pokok, masih tertahan di Pelabuhan Penyeberangan Merak Kota Cilegon, karena belum bisa diberangkatkan menyusul adanya perbaikan dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Muhammadi Ridwan, seorang sopir truk mengatakan truknya sudah menunggu 2 hari di Merak untuk diberangkatkan ke Bakauheni, Lampung.

"Saya sudah dua hari ini *ngetem* di Merak, yaitu satu hari di Jalan Raya Cikuaasa Atas, Merak dan satu hari lagi di dalam pelabuhan. Masih menunggu petugas untuk bisa diberangkatkan," katanya kemarin.

Dia menjelaskan, ia sudah bosan dengan seringnya pihak PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak yang selalu tidak bisa mengatasi penumpukan truk.

Selain membengkaknya biaya operasional, para sopir truk juga mengkhawatirkan adanya teguran dan komplain dari pengguna jasa.

"Setiap pengiriman konsumen selalu mengeluh, karena barang datang tidak tepat waktu, padahal barang itu nantinya akan dipasarkan dan memenuhi kebutuhan pokok warga Palembang," katanya. (*ANTARA*)

Izin usaha pelayaran naik 5,4%

Kesiapan pelayaran untuk *offshore* masih diperdebatkan

OLEH TULARJI *Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan 101 surat izin usaha pelayaran (SIUPAL) baru selama Januari-Agustus 2010 sehingga jumlah perusahaan pelayaran nasional meningkat 5,4% dibandingkan dengan posisi Desember 2009.

Selama 2009, jumlah perusahaan angkutan laut nasional tercatat sebanyak 1.758 perusahaan, sedangkan hingga Agustus 2010 meningkat menjadi 1.858 perusahaan.

Pada periode yang sama, Kemenhub menerbitkan empat SIOPSUS (surat izin operasi pelayaran khusus).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengatakan perkembangan perusahaan angkutan laut nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan perusahaan pe-

layaran nasional itu sejalan dengan melonjaknya armada niaga berbendera Indonesia.

"Jumlah kapal niaga nasional sampai posisi Agustus bertambah 545 unit menjadi 9.715 unit dibandingkan Desember 2009," katanya pekan lalu.

Berdasarkan data Kemenhub, sejak 2004 hingga Agustus 2010, jumlah perusahaan pelayaran nasional terus meningkat. Setiap tahun, rata-rata ada 100 perusahaan pelayaran baru yang mengantongi SIUPAL.

Sebagai gambaran, pada 2004, jumlah perusahaan pelayaran nasional mencapai 1.153 unit, naik menjadi 1.274 perusahaan atau bertambah 121 unit pada 2005 sejalan dengan terbitnya kebijakan nasional asas *cabotage*.

Setahun kemudian, jumlah perusahaan pelayaran nasional melonjak menjadi 1.382 unit, dan terus meningkat menjadi 1.485 pada 2007. Adapun, pada posisi 2008 dan 2009, jumlahnya masing-masing 1.612 dan 1.758 perusahaan.

Di sisi lain, data Kemenhub juga menyebutkan jumlah kapal niaga nasional sampai dengan posisi Agustus 2010 mencapai 9.715 unit, atau naik 5,9% dibandingkan dengan posisi Desember 2009 sebanyak 9.170 unit.

Perkembangan perusahaan angkutan laut

Tahun	SIUPAL	SIOPSUS
2004	1.153	300
2005	1.274	317
2006	1.382	322
2007	1.485	346
2008	1.612	370
2009	1.758	382
2010*	1.859	386

Sumber: Kemenhub
Keterangan: *) periode Januari-Agustus 2010
-SIUPAL (surat izin usaha pelayaran)
-SIOPSUS (surat izin operasi pelayaran khusus).

Selama 5 tahun terakhir, terutama sejak kebijakan nasional asas *cabotage*, jumlah armada niaga nasional meningkat 3.674 unit atau 60,8% dibandingkan dengan posisi Maret 2005 sebanyak 6.041 unit.

Tidak mudah

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan pesatnya perkembangan jumlah perusahaan pelayaran nasional dan armadanya menunjukkan iklim berusaha di sektor ini se-

makin positif.

Dia menjelaskan perkembangan perusahaan pelayaran nasional akan semakin melejit setelah nantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada perusahaan pelayaran yang menggarap pangsa pasar ekspor dan impor.

Johnson mengakui tidak mudah bagi perusahaan pelayaran nasional untuk memenuhi kebutuhan armada niaga nasional di sektor *offshore* (penunjang kegiatan lepas pantai) yang mulai 1 Januari 2011 akan dituntut untuk kapal berbendera asing.

Menurut dia, kapal-kapal yang memerlukan investasi besar dan padat teknologi seperti *jack up rig, drill ship*, MODU, seismik 2D & 3D sulit disiapkan pelayaran nasional karena jenis usahanya bukan termasuk pelayaran.

Dia meminta agar kapal yang masuk dalam kategori C ini dicarikan terobosan yang brilian supaya ke depannya, kapal jenis ini bisa dimiliki oleh orang Indonesia yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah.

"Kami sekarang menunggu apa rencana pemerintah untuk memastikan kapal jenis ini bisa dimiliki pengusaha Indonesia sekaligus mengamankan potensi pa-

sar di sektor *offshore* yang mencapai US\$1,5 miliar per tahun," katanya.

Pekan lalu, Kementerian ESDM meminta agar pelaksanaan kebijakan nasional asas *cabotage* lebih fleksibilitas mengingat sejumlah kapal *offshore* jenis FSRU tidak tersedia yang berbendera Indonesia.

Pemberlakuan asas *cabotage* yang mewajibkan angkutan di dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia tanpa pengecualian untuk sektor migas berpotensi menghambat pencapaian target pemanfaatan gas mulai 2011.

Namun, sejumlah pengusaha nasional menegaskan pelayaran nasional sanggup menyediakan kapal jenis ini. Managing Direktur PT Wintermar Sugiman Layanto mengatakan banyak perusahaan yang sanggup pengadaan kapal FSRU.

Menurut dia, kapal ini akan disediakan baik sendiri-sendiri maupun konsorsium setelah tender dibuka.

"Perusahaan tidak mungkin berinvestasi tanpa ada market yang pasti sehingga pengadaan kapal tipe ini bergantung pada kebutuhan dan hasil tender," tegasnya. (*tularji@bisnis.co.id*)

'Kembalikan tarif Tanjung Priok ke mekanisme pasar'

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Perhitungan dan formulasi tarif bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan agar dikembalikan kepada mekanisme pasar untuk menghindari biaya ekonomi tinggi di pelabuhan.

Bay M.Hasani, Kabid Kepeleabuhanan dan Angkutan Laut Adpel (Administrator Pelabuhan) Tanjung Priok, menilai kesepakatan kegiatan usaha bongkar muat termasuk penetapan bagi hasil dan mekanisme panarifan yang telah disepakati 16 PBM terseleksi dengan Pelindo, belum merepresentasikan seluruh kepentingan pelaku usaha di pelabuhan.

"Karena itu sebaiknya tarif bongkar muat diserahkan saja kepada mekanisme pasar agar iklim bisnis di pelabuhan lebih kondusif," paparnya kepada *Bisnis* Jumat 12 November.

Bay mengatakan rencana pemberlakuan tarif tunggal akan berdampak pada kemandirian usaha bongkar muat di pelabuhan tersebut tersandera apalagi PBM (perusahaan bongkar muat) diwajibkan menyeter kontribusi 40% dari omzet (bukan dari *profit margin*) per kegiatan bongkar muat kepada Pelindo.

Adpel Tanjung Priok telah melayangkan surat kepada Pelindo II dan meminta agar BUMN itu tidak memberlakukan tarif tunggal secara sepihak di Pelabuhan Priok sebelum adanya aturan pelaksanaan jasa bongkar muat yang baru dari Menteri Perhubungan sesuai dengan amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

Dalam dokumen yang diperoleh *Bisnis*, Adpel Tanjung Priok Susetyo Widayat Hadi mengungkapkan hal itu melalui surat yang dia kirim kepada General Manager Pelindo II Tanjung Priok No:GM.763/828/16/AD.TPK.2010 tertanggal 4 November 2010.

Melalui surat itu, Adpel Tanjung Priok mengingatkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran UU Pelayaran dan KM 14/2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

Adpel juga telah menyampaikan persoalan rencana pemberlakuan tarif tunggal bongkar

muat di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui suratnya No:AT.574/2/22/40.TPK.10, tanggal 5 November 2010.

Dalam surat itu disebutkan seleksi PBM di Tanjung Priok dan rencana pelaksanaan tarif tunggal bongkar muat tersebut tidak pernah melibatkan Adpel Tanjung Priok.

Bay mengatakan intansinya tidak pernah dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pelindo II termasuk soal seleksi PBM dan rencana pemberlakuan tarif tunggal di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

Pada, kata dia, penetapan dan pengaturan tarif jasa kepeleabuhanan harus mengacu pada KM 35/2007 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal, dengan melibatkan asosiasi terkait dan diketahui pemerintah.

Info Penerbangan

Dari JAKARTA ke :

- Gunung Sitoli
- Lhokseumawe
- Meulaboh
- Sibolga
- Natuna
- Labuan Bajo
- Maumere
- Tambolaka
- Ende
- Bima
- Baubau
- Kolaka



TOTAL 15
PESAWAT BARU BERTEKNOLOGI TERBARU
A320XLR
TELAH BEROPERASI DI INDONESIA
9 PESAWAT BARU BERTEKNOLOGI TERBARU
DARI MODEL TERBARU DENGAN 72 SEATS.
YANG DIKIRIM LANGSUNG
DARI PABRIK ATR DI PERANCIS



Informasi & Pemesanan Tiket
24 Jam
0804-1-77 88 99
021- 63798000, 63871111
lionair.co.id

PEMBAYARAN TIKET Melalui :
ATM BII, BRI, MANDIRI, BNI, LIPPO, NIAGA, PERMATA, KiiBCA, Travel Agent,
Ticket Sales Airport, Internet dengan Kartu Kredit

periode Juni-Nov '10 Terbang teras dengan

3x SURABAYA 06.00, 07.15, 09.10, 14.30, 16.25, 17.20, 19.20, 21.00	3x PEKANBARU 09.15, 10.40, 16.30
1x MALANG 10.20	2x PANGKAL PINANG 09.35, 14.20
2x SEMARANG 07.00, 16.30	3x BATAM 07.10, 16.20, 11.40
1x SOLO 17.45	1x BERAU 08.40
2x JOGJAKARTA 14.30, 17.50	1x BENGKULU 13.40
1x BANDA ACEH 08.30 MES	2x JAMBI 10.40, 15.00
4x MEDAN 07.00, 08.30, 13.10, 16.45	2x MANADO 09.05, 15.30 VIA BPN
3x PADANG 07.00, 10.50, 15.55	6x UJUNG PANDANG 07.15, 16.25, 21.00 Via SUB, 07.30 Via BPN, 10.30, 22.45
1x PALEMBANG 13.15	2x PALU 09.10 VIA SUB, 16.00

Informasi Reservasi Online :
Tlp. : (021) 386 4255

BATAVIA AIR menangkan

1x LUWUK 07.15 VIA SUB, UPG (4 x Seminggu)	1x AMPENAN 17.20 VIA SUB
2x KENDARI 10.30 VIA UPG, 08.15	2x KUPANG 06.00, 14.30 VIA SUB
5x PONTIANAK 06.00, 09.40, 12.40, 14.05, 18.05	1x JAYAPURA 22.45 VIA UPG, MKW (4 x seminggu)
2x BANJARMASIN 08.40, 18.20	1x MANOKWARI 22.45 VIA UPG
3x BALIKPAPAN 07.30, 08.40 VIA BDJ, 15.30	1x SORONG 22.45 VIA UPG (3 x seminggu)
1x TARAKAN 08.15	1x WAINGAPU 08.30 Via DPS, KOE (3 x seminggu dari SUB)
1x PALANGKA RAYA 12.40	1x MAUMERE 08.30 Via DPS, KOE (4 x seminggu dari SUB)
1x TANJUNG KARANG 08.00	
2x DENPASAR 13.40, 19.25	

Email : it-helpdesk@batavia-air.co.id
www.batavia-air.com

360 PAKET UMROH

2x AMBON 01.05, 06.00 VIA SUB	1x SINGAPORE 07.00
2x TERNATE 01.25, 21.00 VIA SUB, UPG	1x KUCHING 09.40 VIA PNK (3 x seminggu)
1x TANJUNG PANDAN 10.30	1x GUANGZHOU 08.10 (3 x seminggu)
1x GORONTALO 07.15 VIA SUB, UPG (3 x seminggu)	1x JEDDAH 03.00 (5 x seminggu)
	1x RIYADH 03.00 (2 x seminggu)



KEBERANGKATAN DARI : Bandara Soekarno Hatta DOMESTIK TERMINAL 1C ; INTERNATIONAL TERMINAL 2D

Route & Jam Keberangkatan
Menembangi 39 Kota Indonesia & 5 Kota Di Luar Negeri

BATAVIA AIR
Trust Us To Fly

Reservasi Jakarta
(021) 38 999 888

Mulai :
Tgl. 20 Okt * 2010

Jakarta - Tanjung Pinang (pp)
Pk. 07.40 Wib, Setiap Hari

BATAVIA AIR 10 OKTOBER 2010
Beroperasi Penuh di **TERMINAL 1 C**
Bandara Soekarno Hatta

SALES & MARKETING : Tlp. (021) 386 4338,
Fax. : (021) 352 1738